

DI PEGUNUNGAN TENGAH JATENG

BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem

CILACAP (KR) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat di sebagian wilayah Jawa Tengah khususnya pegunungan tengah Jateng dan bagian Barat Jateng untuk waspada potensi terjadinya cuaca ekstrem pada tanggal 22-23 Juli 2022.

"Berdasarkan rilis yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi (Stamet) Ahmad Yani Semarang, Kamis (21/7), cuaca ekstrem berpotensi terjadi di wilayah pegunungan tengah Jateng yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, dan sekitarnya pada 22 Juli 2022," kata Kepala Kelompok Teknis BMKG Stamet Tunggal Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Kamis (21/7).

Sementara pada 23 Juli 2022, kata Teguh Wardoyo, cuaca ekstrem berpotensi terjadi di wilayah Barat Jateng yang meliputi Kabupaten Cilacap, Brebes, Banyumas, Purbalingga, dan sekitarnya.

Menurut Teguh, potensi cuaca ekstrem tersebut berupa curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. "Prakiraan potensi cuaca ekstrem ini berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer serta anomali suhu muka laut di Samudera Hindia Selatan Jawa dan Laut Jawa yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah," katanya.

Selain itu, kata Teguh Wardoyo, kelembapan udara yang relatif cukup tinggi turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia.

Terkait hal itu, Teguh mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem pada 22-23 Juli 2022 yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung, terutama untuk masyarakat yang berada dan tinggal di wilayah rawan bencana hidrometeorologi.

Dikatakan, BMKG Stamet Tunggal Wulung Cilacap pada Kamis (21/7) kembali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di Laut Selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku hingga Jumat (22/7).

Dalam hal ini, tinggi gelombang 2,5-4 meter yang masuk kategori tinggi berpotensi terjadi di Perairan Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Perairan Selatan Yogyakarta. (Ant/San)-d

DUGAAN PENCUCIAN UANG BUDHI SARWONO KPK Periksa Sembilan Saksi

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sembilan saksi di Mako Brimob Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (20/7), dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh tersangka Budhi Sarwono yang juga mantan Bupati Banjarnegara. Atas pemeriksaan ini, KPK mendalami aliran uang yang diduga diterima tersangka melalui beberapa orang kepercayaan untuk membeli sejumlah aset.

"Untuk mendalami hal tersebut, KPK memeriksa sembilan saksi. Para saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka BS melalui beberapa orang kepercayaannya, yang diduga lebih lanjut untuk membeli sejumlah aset-aset bernilai ekonomis," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (21/7).

Mengenai sembilan orang saksi yang diperiksa itu, menurutnya, Wakil Banyumas Sadewo Tri Lastiono, mantan bupati

Semarang Mundjirin Engkun Suparmadiredjo, dan Kepala Seksi Penyelenggaraan Permukiman di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara Meirina Dwi Hartika.

Selain itu, jelas Ali, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Banjarnegara Veriyanto, pensiunan ASN Pemkab Banjarnegara Tugino, Rohiman selaku Satpam, serta tiga pihak swasta masing-masing Sartono, Afton Saefudin, dan Bintang Narsasi.

Dalam penyidikan kasus itu, lanjutnya, KPK juga memanggil lima saksi lain untuk tersangka Budhi. Para saksi ini adalah Bupati Cilacap Totto Suwanto Pamuji, Sugeng Riyanto selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Yudha Kencana, Kepala Cabang Bank Jateng Cabang Banjarnegara Siti Nafisah, serta dua pihak swasta masing-masing Susi Widiyanti dan Agustin Angela.

(Ful)-f

BAGI PSE YANG BELUM MENDAFTAR Kominfo Beri Tambahan Waktu 5 Hari

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan waktu tambahan lima hari lagi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang belum mendaftarkan agar segera mengikuti aturan tersebut.

"Bagi mereka yang tidak mendaftarkan peringat waktu, kami kirimkan surat peringatan untuk segera melengkapi. Lima hari kerja," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Kamis (21/7).

Kominfo memberikan waktu hingga 20 Juli bagi PSE untuk mendaftarkan ke Online Single Submission (OSS). Jika belum mendaftarkan sampai batas waktu tersebut, secara bertahap Kominfo akan memberi-

kan sanksi.

Sanksi pertama berupa teguran tertulis, yang menurut Kominfo saat ini sedang dilakukan. PSE yang mendapat teguran diminta untuk mendaftarkan dalam batas lima hari tersebut. Jika setelah lima hari masih juga belum mendaftarkan, Kominfo akan memulai proses pemblokiran.

Kominfo juga berencana memberikan denda kepada PSE yang tidak mendaftarkan, namun, aturan tersebut, yang akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, masih dibahas antarkementerian.

Kominfo menyatakan, PSE yang layannya diblokir bisa mengajukan normalisasi dengan melengkapi seluruh ketentuan yang diminta Pemerintah. (Ant/San)-f

DIANGGAP TIDAK KOOPERATIF

Nikita Mirzani Ditangkap di Senayan City

SERANG (KR) - Artis NM (Nikita Mirzani) ditangkap Petugas Kepolisian Resor Kota Serang, Kamis (21/7), pukul 14.50 WIB di Lobi Utama Mall Senayan City, Jakarta Selatan.

"Penangkapan terhadap NM itu dilakukan secara persuasif terlebih dahulu dan menunjukkan identitas penyidik dan surat perintah penangkapan," kata Kepala Reserse dan Kriminal Polresta Serang, Ajun Komisaris David Kusuma, di Serang, Banten, Kamis (21/7).

Penyidik Satreskrim Polresta Serang menangkap NM yang berstatus ter-

sangka melibatkan tiga perempuan polisi. NM saat ditangkap di lobi utama Mall Senayan City, Jakarta Selatan, tidak melawan sehingga semuanya bisa berjalan lancar. "Kami kini tengah memeriksa tersangka NM yang sebelumnya tidak menghadiri jadwal pemeriksaan itu," katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Komisaris Besar Polisi Shinto Silitonga, mengatakan, penyidik Satreskrim Polresta Serang sebelumnya melayangkan surat panggilan terhadap NM pada Senin lalu (20/6) untuk diminta keterangan pada Jumat (24/06). Surat panggilan itu direspons dengan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan pada Rabu (6/7), tetapi NM juga tidak hadir di depan penyidik.

Silitonga menyatakan, penyidik telah mengirimkan berkas dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik sesuai pasal 45 dan pasal 51 UU ITE dan pasal 311 KUHP pada Selasa (12/7), yang dilanjutkan pengeledahan di rumah NM, di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (14/7). Di situ polisi menyita alat bukti berupa satu unit iPad.

Penyidik mengeledah dan menyita setelah mereka mendapat izin mengeledah dan menyita dari PN Jakarta Selatan pada 4 Juli 2022 dan 7 Juli 2022.

BERI KEPASTIAN HUKUM Penting, Penegasan Batas Tanah dan Wilayah



Podcast Rembag Kaistimewan 'Urgensi Batas Tanah dan Wilayah dalam Aspek Pelayanan Publik'.

KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta melingkupi lima urusan, salah satunya pertanahan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Penegasan batas tanah dan wilayah akan memberikan kepastian hukum sekaligus landasan bagi pemberian pelayanan publik yang fair, transparan dan akuntabel.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi menuturkan, merujuk Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, fungsi pertanahan ada tiga yaitu berkaitan dengan pengembangan kebudayaan, terkait kesejahteraan masyarakat dan terkait sosial.

Namun, lanjut Aris, yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat terkait pertanahan ini adalah masih seputar dokumen atau sertipikat. Padahal mengelola sertipikat tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) harus terkait dengan ketiga fungsi pertanahan yaitu pengembangan kebudayaan, kesejahteraan masyarakat dan sosial.

"SG dan PAG saat ini banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan urusan pertanahan di Yogya ini agak berbeda dengan tanah di luar Yogya. Paniradya terus mengedukasi soal pertanahan ini kepada masyarakat lewat berbagai media seperti podcast ataupun film-film yang sudah diunggah di kanal YouTube Paniradya Kaistimewan," terang Aris dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertema 'Urgensi Batas Tanah dan Wilayah dalam Aspek Pelayanan Publik'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (21/7) dan disiarkan live streaming di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan. Kegiatan ini didanai dengan dana keistimewaan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain Surodi ST MH (Kepala Bidang Survei & Pemetaan Kanwil BPN DIY), Yulianto Anang SIP MM (Sub Koordinator Substansi, Administrasi Kewilayahan, Bagian Pemerintahan Setda Gunungkidul) dipandu Wijil Rachmadani. Acara ini diemeriahkan PCA Entertainment dan Sanggar Kanyut

Wiraga. Menurut Aris, penetapan dan penegasan soal tanah ini sangat penting, karena dengan adanya penetapan dan penegasan berkaitan dengan batas tanah, maka akan jelas tanah yang dikelola, letaknya di mana hingga status kepemilikan, apakah hak milik, hak guna bangunan atau kekancingan sehingga tidak terjadi konflik ketika tanah itu dimanfaatkan.

"Inti dari tujuan penetapan dan penegasan batas tanah dan wilayah adalah meletakkan pada dasar yang paling awal sebelum tanah itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Harus ada kekuatan hukum (sertipikat tanah) sekaligus harus terkait dengan pengembangan kebudayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sosial," katanya.

Yulianto Anang mengatakan, Pemda Gunungkidul sudah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan sejak 2020, dan tahun 2022 ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan. Dalam melakukan penetapan dan penegasan batas tanah dan wilayah pihaknya memasang pilar. Selain itu ada berita acara kesepakatan tentang penetapan dan penegasan batas wila-

nya tersebut. "Output akhirnya adalah batas kelurahan disahkan melalui peraturan bupati," katanya.

Sementara itu Surodi mengatakan, dalam melakukan legalisasi aset atau yang sering disebut oleh masyarakat sebagai sertifikasi tanah, BPN membutuhkan data fisik dan data yuridis.

Dijelaskan, data fisik yang dimaksud berupa batas tanah yang harus mendapat persetujuan/kesepakatan dengan pihak-pihak terkait (tetangga yang berbatasan). "Kami BPN tidak dapat memproses sertifikasi tanah jika soal batas tanah ini belum clear, jadi harus dicapai kesepakatan dulu soal batas tanah," katanya.

Menurut Surodi, dulu proses pemetaan tanah masih dilakukan secara manual, sehingga dimungkinkan terjadi kesalahan. Misalnya sertipikat tanah sudah ada, namun data-data soal pemetaan (batas tanah) belum tercatat secara digital (saat ini). Oleh karena itu, diimbau masyarakat untuk tetap menjaga tanda batas tanahnya. "Kalau tanda batas ini tetap ada (terjaga), maka tidak akan terjadi overlap dengan batas tanah tetangganya," katanya. (Dev)

BNPT-PRESIDEN TIMOR LESTE BERTEMU

Rajut Kerja Sama Tanggulasi Terorisme

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar MH menyatakan, lembaga yang dipimpinnya selama ini fokus pada pencegahan radikal terorisme dengan merajut kerja sama yang erat dengan unsur pemerintah, masyarakat dan negara sahabat. Diakuinya, penyalahgunaan agama dalam aktivitas terorisme masih menjadi tren.

Boy Rafli mengemukakan hal itu saat bertemu Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, di Jakarta, Kamis (21/7). Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT menawarkan kerja sama penanggulangan terorisme antara Indonesia dan Timor Leste.

"Kami melakukan kerja



Ketua BNPT Boy Rafli Amar berbincang dengan Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta.

sama dengan institusi atau organisasi agama untuk menyamakan persepsi karena terorisme menyalahgunakan ajaran agama," kata Boy Rafli.

Kepala BNPT ini menjelaskan tentang narasi propaganda yang dengan cepat tersebar melalui dunia

mayor. Dalam menghadapi tren tersebut, edukasi ajaran agama yang moderat dan toleran serta cara berinteraksi di media sosial yang baik dan bijak, menjadi strategi pencegahan terorisme yang efektif.

"BNPT saat ini fokus bekerja dalam pencegahan,

bagaimana membangun semangat toleransi, membangun pemahaman di masyarakat, bahwa aktivitas terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apapun, bagaimana kelompok teror menyebarkan penyalahgunaan agama itu di media sosial. Mengedukasi masyarakat cara bermedia sosial, sangat penting dilakukan," pesan Boy Rafli.

Mendengar keterangan mengenai pendekatan penanggulangan terorisme yang dilaksanakan BNPT, Presiden Jose Ramos Horta menyampaikan apresiasi kinerja BNPT dalam menghadapi isu terorisme secara efektif. Ia menilai prospektif positif ini tidak hanya datang dari Timor Leste saja, tetapi juga negara barat lainnya. (Obi)-d

KEMENTERIAN ESDM PERKUAT PROGRAM

Konversi 1.000 Motor BBM ke Listrik

JAKARTA (KR) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat program konversi 1.000 unit sepeda motor penggerak berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik, sebagai salah satu upaya menuju net zero emission pada 2060, sekaligus mengurangi beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara.

"Tahun 2021, kita telah melakukan konversi 100 motor BBM ke listrik dan itu dilakukan dari motor-motor yang dimiliki Kementerian ESDM. Tahun ini, kita melangkah ke 1.000 unit. Pemerintah ingin memberi contoh kepada masyarakat agar tercapai pasar sepeda motor listrik," ujar Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Luh Nyoman Puspa Dewi di Jakarta, Kamis (21/7).

Untuk itu Kementerian ESDM mengundang instansi ter-

kait melakukan Rapat Koordinasi Pilot Project Program Konversi 1.000 Unit Sepeda Motor BBM ke Listrik di Jakarta, Kamis. Selain penandatanganan komitmen bersama, rakor juga membahas berbagai tantangan serta solusi dalam mencapai target.

Saat ini Kementerian ESDM sebagai katalisator program konversi telah bekerja sama dengan bengkel-bengkel usaha kecil dan menengah (UKM) untuk melakukan pelatihan konversi motor BBM ke listrik. Kerja sama dengan produsen komponen juga dilakukan untuk mendapatkan harga komponen yang ekonomis.

"Setidaknya 50 bengkel UKM telah dilatih untuk program konversi 1.000 unit motor tahun ini. Untuk mendapatkan nilai keekonomian komponen, Kementerian ESDM juga telah menjalin kerja sama dengan produsen komponen seperti PT

Chengko Harapan Nusantara, PT Baja Elektrik Motor, dan PT Industri Battery Indonesia. Dengan kerja sama ini diharapkan dapat melokalisasi komponen konversi dengan nilai keekonomian yang terjangkau," jelasnya.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani menambahkan, program konversi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Pada rapat internal 21 Juni 2022, Presiden memberikan pengantar, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), mulai dari pembangkit listrik tenaga air, angin, surya, secara paralel dengan konversi kendaraan berbasis BBM ke listrik. (Ant/San)-d



KR-Instagram

Nikita Mirzani

(*)Ant)-d